

Arab Spring: Dimensi Domestik, Regional dan Global

M. Muttaqien

Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis keterkaitan antara globalisasi dan demokratisasi di negara-negara Arab dengan Arab Spring sebagai studi kasus. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengamati dimensi domestik, regional dan global yang melingkupi peristiwa Arab Spring tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa demokratisasi di Arab adalah fenomena lintas batas yang tidak hanya melibatkan aktor negara namun juga aktor non negara mulai dari individu dan kelompok masyarakat sampai dengan masyarakat sipil global. Namun, konsolidasi demokrasi di Timur Tengah adalah jalan yang sulit karena aktor negara diwakili para elitnya menggunakan cara-cara tidak demokratis untuk menghalangi kekuatan oposisi meraih kekuasaan. Pada saat yang bersamaan, negara-negara Barat yang memiliki pengaruh terhadap elit di Timur Tengah tidak serius dalam mendorong penerapan demokrasi. Sedangkan kelompok oposisi yang umumnya berasal dari kekuatan politik Islam dengan menggunakan media dan teknologi informasi mencoba untuk mendemokratisasikan sistem politik di negara-negara Arab. Mereka meyakini bahwa demokrasi adalah jalan untuk mencegah tampilnya kekuasaan tirani di negara-negara Arab.

Kata-kata kunci: *globalisasi, demokratisasi, musim semi Arab*

This paper analyzes correlation between globalization and democratization in Arab World with the Arab Spring as a case of study. Qualitative analysis is used to observe domestic, regional and global dimension of the Arab Spring. This research found that democratization in Arab is cross border phenomena which are involved not only state actors, but also non-state actors starting from individuals and groups of people to global civil society. It is a difficult journey to consolidate democracy in the Middle East due to state actors represented their elites generally prevent oppositions coming to power by using non-democratic action. At the same time, Western countries which have influence to the elites in the Middle East are not serious on democracy. Meanwhile, oppositions mostly coming from Islamic movements by using media and information technology try democratizing political system in Arabic countries. They believe that democracy is a way to prevent a tyrannical power coming to power.

Keywords: *globalization, democratization, Arab Spring*

Arab Spring diawali di Tunisia ketika seorang pedagang kaki lima Mohammed Bouazizi (26 tahun) membakar diri sebagai bentuk protes ketidakadilan rezim Ben Ali dan berbuntut demonstrasi yang memaksa Presiden Ben Ali turun dari kekuasaannya (Tocqueville 2011). Penyebaran informasi melalui media massa dan media sosial mendorong tuntutan perubahan rezim menjalar ke negara-negara Arab lainnya. Presiden Libya Moammar Khadlafi jatuh dan terbunuh setelah meletus perang saudara di negara ini. Kemudian, Maroko merespon tuntutan publik dengan melakukan pemilu multi partai pada 27 November 2011. Hal yang sama dilakukan Aljazair dan Yordania. Sementara itu, negara-negara kaya seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Oman dengan pendekatan kesejahteraan (*welfare state*) berusaha bertahan dari tuntutan perubahan politik. Situasi politik tidak menentu juga terjadi di Mesir, Yaman, dan Syria. Presiden Husni Mubarak di Mesir harus meninggalkan istananya setelah demonstrasi merebak selama sehari-hari di bulan Januari dan Februari 2011. Pemilihan umum yang dilaksanakan di negara tersebut menempatkan Ikhwanul Muslimin sebagai peraih suara terbanyak di parlemen dan bahkan memenangkan pemilihan presiden dengan menempatkan Muhammad Morsi sebagai pengganti Mubarak. Namun, Morsi hanya bertahan setahun dan digulingkan militer dibawah Jenderal As-Sisi. Kemudian, rakyat Yaman menuntut Presiden Abdullah Shaleh turun dari jabatannya. Situasi politik *chaos* terjadi di negeri ini ketika kelompok Houthi yang beraliran Syiah beraliansi dengan Abdullah Shaleh yang sudah tidak lagi menjabat presiden berusaha merebut kekuasaan dari Presiden Hadi yang mendapat dukungan Arab Saudi.

Sementara itu di Syria, sebagai imbas dari *Arab Spring* meletus perang saudara. Konflik masih terus berkecamuk dan menewaskan lebih dari 200.000 jiwa ketika kelompok-kelompok oposisi menuntut President Bashar Assad turun dari jabatannya. Minoritas Alawi (11%) yang memerintah Syria dibawah Assad dengan kekuatan militer yang dimiliki berhadapan dengan kelompok-kelompok oposisi yang didominasi kalangan Sunni (70%). Konflik ini melibatkan kekuatan-kekuatan luar seperti Iran, faksi Hezbollah, dan Rusia yang mendukung Assad di satu sisi; dan Turki, negara-negara Arab, serta negara-negara Barat yang mendukung oposisi di sisi yang lain (Landis 2012). Bahkan, kemudian muncul kelompok baru yaitu *Islamic State of Iraq and Sham* (ISIS) yang menguasai wilayah-wilayah perbatasan antara Irak dan Syria yang tidak hanya menentang rezim Syiah di Syria dan Irak, namun juga berkonflik dengan kelompok-kelompok bersenjata Sunni yang tidak sejalan dengan garis perjuangan ISIS.

Tulisan ini akan membahas keterkaitan antara globalisasi dan demokratisasi dalam ruang lingkup domestik, regional dan internasional dalam kasus *Arab Spring* dan bagaimana keterlibatan

aktor negara dan non-negara dalam menggerakkan tuntutan perubahan di negara-negara Timur Tengah.

Globalisasi di Timur Tengah

Globalisasi ditandai dengan hubungan antar negara atau antar kawasan yang mengalami akselerasi sedemikian cepat sehingga muncul kesadaran lintas batas negara (Baylis 2005, 22), integrasi dan saling ketergantungan (Dollar 2007). Globalisasi juga identik dengan liberalisasi perdagangan dan ketertarikan negara-negara Timur Tengah untuk masuk dalam rezim perdagangan bebas cukup tinggi (Doron, 2012). Arab Saudi sebagai aktor utama di kawasan ini misalnya memiliki minat yang tinggi untuk masuk ke WTO sejak tahun 1996, dan diluluskan keanggotaannya tahun 2008. Keanggotaan Arab Saudi dalam WTO dinilai lambat bila dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya seperti UEA, Qatar, Bahrain dan Oman karena peraturan-peraturan dagang domestik Arab Saudi perlu banyak perubahan sehingga *compatible* dengan aturan dagang WTO. Kecenderungan negara-negara Arab untuk lebih dalam masuk ke perdagangan internasional juga terlihat dari berkembangnya pusat-pusat jasa keuangan. UEA mengembangkan Abu Dhabi sebagai sentral perdagangan dan jasa keuangan di Timur Tengah menyaingi Hongkong dan Singapura. Kesadaran bahwa sumber daya alam minyak suatu saat akan habis, mendorong elit politik di negara tersebut mencari alternatif lain untuk menggerakkan ekonomi mereka saat komoditi minyak sudah tidak bisa diandalkan. Dengan memanfaatkan kekayaan minyak yang saat ini masih dimiliki serta keuntungan geografis sebagai kawasan tempat pertemuan antara Timur dan Barat, Abu Dhabi berkembang menjadi kota pelabuhan dan galangan kapal bagi kapal-kapal besar yang melewati Teluk Persia. Bahkan Bandar Udara Abu Dhabi berkembang menjadi bandara transit yang menghubungkan Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Keuntungan ekonomi dari minyak diinvestasikan untuk membangun gedung-gedung pencakar langit sebagai pusat-pusat bisnis. Negara Teluk lainnya Arab Saudi pun tidak mau ketinggalan mengembangkan Jeddah sebagai pusat bisnis. Seolah bersaing dengan Abu Dhabi, Arab Saudi juga berencana membangun gedung-gedung tinggi mengalahkan popularitas Burj Al-Khalifa.

Negara tetangga UEA, Qatar juga sedang berusaha untuk menjadi pusat perubahan di Timur Tengah terutama dengan keberadaan media berbahasa Arab yang sangat berpengaruh *Al-Jazeera* (Bahry 2001). Di saat media Barat menampilkan keberhasilan operasi militer di Afghanistan dan Irak, *Al-Jazeera* menampilkan sisi lain dari perang seperti jatuhnya korban di pihak sipil dan wawancara khusus. Keberhasilan *Al-Jazeera* mewawancarai tokoh-tokoh kunci rezim

Taliban di Afghanistan menjadi penyeimbang pemberitaan media massa Barat. Terlebih ketika *Al-Jazeera* secara eksklusif berhasil mewawancarai Usamah bin Laden dan Dr Ayman Al-Zawarihi memunculkan tuduhan bahwa media ini telah menjadi “corong” teroris. Itulah sebabnya mengapa dalam operasi militer AS di Afghanistan sasaran serangan bukan hanya tentara Taliban namun juga kantor *Al-Jazeera*. Hal yang sama terulang kembali pada serangan AS ke Irak tahun 2003 ketika stasiun *Al-Jazeera* menjadi target serangan rudal-rudal AS.

Paparan di atas menunjukkan bahwa globalisasi dalam bidang media telah dimanfaatkan baik oleh negara aggressor, negara yang diduduki, dan aktor-aktor non negara termasuk kelompok-kelompok yang dikategorikan AS sebagai teroris. Perkembangan terakhir, media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan youtube juga dijadikan sebagai ajang untuk mendorong proses perubahan diberbagai negara di Timur Tengah, merekrut pengikut, memkampanyekan aksi, dan perlawanan atas penindasan penguasa seperti yang terjadi dalam gelombang *Arab Spring*.

Transformasi di bidang informasi yang terjadi di Timur Tengah dalam tataran politik, menciptakan apa yang dikenal sebagai *political community* yaitu sekumpulan manusia yang diantara anggotanya diikat kesamaan simbol, saling bekerjasama untuk merealisasikan tujuan mereka. Komunitas ini berusaha untuk mengatur diri mereka sendiri dengan pijakan aturan yang bebas sehingga tidak teralienasi aturan tersebut (Linklater 2005, 713). Dengan kata lain, mereka berusaha untuk mendemokratisasikan kehidupan politik mereka tanpa harus menunggu institusi formal (negara). *Arab Spring* adalah fenomena gerakan massa yang memang menginginkan diakuinya eksistensi pihak di luar negara untuk hidup lebih bebas dan mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Gerakan-gerakan Islam yang menginginkan perubahan politik seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, An-Nahda di Tunisia, Al-Ishlah di Yaman, Hamas di Palestina, dan Hezbollah di Lebanon pertumbuhannya berada di luar koridor negara. Gerakan-gerakan tersebut memiliki disiplin organisasi yang mengikat anggotanya yang bahkan institusi formal negara mengalami kesulitan untuk mengendalikan (Voll et al. 2012). Ikhwanul Muslimin sebagai contoh, kendatipun organisasi ini ditetapkan sebagai gerakan terlarang di Mesir sejak era Gamal Abdul Nasser tahun 1950an, namun pada kenyataannya Al-Ikhwan tetap eksis hingga saat ini. Hamas misalnya tumbuh dan berkembang di luar kendali Otoritas Palestina sebagai produk kesepakatan Oslo 1993. Gerakan ini bahkan berhasil menggeser dominasi Fatah pada pemilu 2006. Hal yang sama juga terjadi di Lebanon ketika Hezbollah bertindak seakan negara dalam negara karena organisasi ini memiliki

independensi dari pemerintahan di Beirut, memiliki angkatan bersenjata, dan bahkan terlibat konflik langsung dengan Israel.

Arab Spring memberikan kesempatan kepada *political community* semacam ini untuk berpartisipasi dalam perubahan politik di negara masing-masing. Partai An-Nahdha pimpinan Rachid Ghannouchi yang memiliki kedekatan dengan pemikiran Al-Ikhwan terlibat aktif dalam gerakan revolusi ini. Ghannouchi sendiri selama bertahun-tahun terusir dari negaranya (tinggal di Perancis) karena sikap kritis terhadap rezim Bin Ali. Ketika Presiden Bin Ali berhasil digulingkan Ghannouchi kembali ke negaranya, ikut serta dalam pemilu dan akhirnya An-Nahdha memenangkan pemilu (*the Economist*, 29/10/2011). Kemudian di Maroko setelah Raja Muhammad IV melakukan reformasi politik agar gelombang *Arab Spring* tidak mengancam kekuasaannya dengan melakukan pemilu multi partai, Partai Keadilan dan Pembangunan yang juga memiliki kedekatan dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin memenangkan pertarungan dalam pemilu yang digelar pada 27 November 2011 (*the Washington Post*, 28/11/2011).

Demokratisasi di Timur Tengah

Demokratisasi adalah suatu proses yang diawali dengan runtuhnya rezim otoriter, pelebagaan aturan main yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan konsolidasi rezim yang demokratis. Proses peralihan dari runtuhnya rezim otoriter menuju ke penegakkan sistem demokrasi disebut sebagai masa transisi (Huntington 1991). Pada periode transisi ini situasi tidak menentu sehingga sangat mungkin runtuhnya rezim otoriter tidak diikuti munculnya rezim yang demokratis, tetapi malah diikuti tampilnya rezim otoriter baru seperti yang terjadi di Mesir dan Libya. Dengan kata lain, proses demokratisasi tidak terjadi. Fenomena tuntutan untuk mendemokratisasikan kehidupan politik di Timur Tengah saat ini dapat dilihat dalam tiga dimensi pembahasan yaitu domestik, regional dan global.

Dimensi Domestik: Hubungan Elit dan Massa

Pola hubungan elit dan massa dalam kehidupan sosial di Timur Tengah dapat dikategorikan menjadi tiga struktur: elit tradisional, elit transisional dan elit modern. Elit tradisional mengacu pada kekuatan tradisi yang merekonstruksi hubungan antara elit dan massa. Elit dalam hal ini berasal dari kepala suku (kabilah), ulama, pemimpin militer (*warlords*), para saudagar, pemilik tanah (*landlords*) dan kalangan bangsawan. Ketika terjadi ketidakstabilan hubungan diantara elit tradisional atau antara elit tradisional dengan massa, maka akan muncul struktur elit yang kedua yaitu elit transisional. Dalam struktur elit

transisional ini terjadi pemisahan peran antara elit tradisional dan modern. Sedangkan struktur elit modern merujuk pada suatu mekanisme hubungan antar elit atau antara elit dan massa yang didasarkan pola hubungan modern yang mengacu pada konstitusi (Andersen 1998). Struktur hubungan ini mengalami pergeseran terutama ketika terjadi gelombang demokratisasi di Timur Tengah. Struktur elit di beberapa negara Timur Tengah tidak lagi sepenuhnya tradisional dan ataupun modern, namun, lebih cenderung mengarah pada transisional. *Arab Spring* telah menggeser ikatan-ikatan kesukuan dan ikatan-ikatan tradisional lainnya. Perubahan ini disebabkan oleh munculnya kekuatan baru dari kalangan masyarakat yang tidak terkooptasi oleh kekuatan-kekuatan elit yang ada sebelumnya. Mereka ini adalah organisasi-organisasi keagamaan yang tidak hanya bergerak di bidang sosial keagamaan, namun juga bergerak di bidang politik. Sebuah transformasi sosial yang didorong oleh deprivasi relatif yang menyebar di masyarakat dan menemukan momentum ketika terjadi pergolakan di Tunisia. Ikatan yang menggerakkan mereka bukan ikatan-ikatan tradisional, namun ikatan persamaan nasib dan kekecewaan kepada rezim yang tiran.

Sebagai gambaran Ikhwanul Muslimin di Mesir adalah suatu kekuatan yang mampu menghimpun massa yang tidak didasarkan pada ikatan-ikatan elit tradisional. Mereka diikat oleh sebuah visi dan misi perjuangan sebagaimana tergambar dalam urutan amal (aksi) pergerakan: membentuk pribadi Muslim, membentuk keluarga Muslim, membentuk masyarakat Muslim, membebaskan negeri Muslim dari segala bentuk dominasi asing, membentuk sistem pemerintahan yang Islami, dan menjadikan Islam sebagai guru bagi semesta alam. Mereka bukan merupakan bagian dari elit ulama di Mesir, dalam hal ini Al-Azhar, bahkan terkadang berseberangan dengan elit tradisional tersebut. Ini terlihat dari hubungan yang tidak harmonis antara Syaikh Al-Azhar dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir terutama ketika terjadi pergolakan di negeri ini dan Syaikh Al-Azhar berada di barisan yang menentang Presiden Morsi.

Dinamika politik domestik sebagai akibat dari perkembangan teknologi tidak lagi menjadi konsumsi elit, namun sudah masuk menjadi ranah publik. Bahkan gerakan-gerakan massa menentang rezim otoriter dengan menggunakan teknologi modern seperti facebook, twitter, WA, youtube dan media lainnya tanpa ada sensor. Aksi-aksi yang mereka lakukan di-*upload* di youtube diakses oleh publik domestik dan internasional. Upaya yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa untuk membatasi informasi publik ternyata tidak berhasil, karena kekuatan-kekuatan di luar negara yang mengalami pergolakan ikut membantu menyebarluaskan informasi keluar dari wilayah konflik (Lesch 2011). Revolusi di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Syiria adalah gambaran

tentang pengaruh transformasi teknologi informasi dalam kehidupan politik.

Idealnya ketika elit tradisional berhasil digulingkan akan menghasilkan elit transisional yang mengantarkan sistem politik menuju terwujudnya elit modern. Namun, upaya mewujudkan ini bukan perkara yang mudah karena elit-elit lama masih menduduki jabatan-jabatan strategis dan mereka tidak mau mengorbankan kepentingan mereka ketika terjadi transisi. Elit militer yang pada umumnya mendapat *previlege* dalam struktur elit tradisional tidak rela apabila hak-hak istimewa yang selama ini mereka peroleh hilang ketika terjadi transformasi politik. Elit militer di Mesir, contohnya, mereka dengan terang-terangan meng kudeta Presiden Morsi yang terpilih secara demokratis karena khawatir *previlage* yang menyangkut sumber-sumber ekonomi yang diperoleh selama rezim Mubarak berkuasa dapat hilang.

Selain elit militer, elit pengusaha yang selama ini mendapatkan keuntungan-keuntungan bisnis dari penguasa diktator juga berusaha menghalang-halangi transformasi politik menuju kehidupan yang lebih demokratis. Perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Arab Saudi, misalnya, tentu tidak menghendaki apabila perubahan sistem politik yang lebih demokratis di negeri ini akan menggeser dinasti yang ada yang sangat mungkin rezim yang baru tidak pro dengan kepentingan mereka. Salah satu alasan mengapa FIS di Aljazair diganjil untuk memenangkan pemilu nasional di awal 1990an adalah karena kekhawatiran perusahaan-perusahaan Perancis yang sudah banyak menginvestasikan modalnya di Aljazair. Mereka khawatir kalau kalangan Islam memegang tampuk kekuasaan keuntungan ekonomi yang mereka peroleh selama ini akan tergerus (Esposito 1993).

Selain elit militer dan pengusaha, pihak lain yang dapat menjadi penghalang bagi transformasi ke arah kehidupan yang demokratis adalah birokrasi. Saat HAMAS berhasil memenangkan pemilu, salah satu hambatan untuk merealisasikan tujuan politik gerakan ini adalah resistensi birokrasi Otoritas Palestina yang didominasi faksi Fatah. Ketika terjadi kekacauan politik akibat isolasi Israel dan Barat, HAMAS tidak dapat menggerakkan kementerian dalam negeri untuk mewujudkan tertib sipil (Muttaqien 2012). Hal yang sama juga dialami Ikhwanul Muslimin di Mesir yaitu ketika Presiden Morsi mengalami kesulitan menjalankan pemerintahan ketika masih banyak pejabat-pejabat di Mesir yang masih loyal kepada mantan Presiden Hosni Mubarak kendatipun ia berada dalam status tahanan militer. Terbukti upaya-upaya untuk mengadili Hosni Mubarak mengalami kesulitan, bahkan ketika Presiden Morsi berhasil dikudeta, mantan Presiden Mubarak malah dibebaskan dari penjara militer dan menjalani tahanan rumah.

Dimensi Regional: Antara Qaumiyya dan Wathaniyya

Rentetan gelombang demokratisasi yang melanda kawasan Timur Tengah khususnya di negara-negara Arab tidak dapat dilepaskan dari adanya dua model nasionalisme yang berkembang di wilayah ini: *qaumiyya* dan *wathaniyya* (Drysdale 1985). Nasionalisme *qaumiyya* adalah suatu paham kebangsaan yang didasarkan pada kesamaan bangsa, bahasa, dan latar belakang sejarah. Dalam hal ini mereka diikat oleh kesamaan sebagai bangsa Arab, berbahasa Arab dan diikat sejarah yang relatif sama yaitu sejarah peradaban Islam. Pergolakan yang terjadi di satu wilayah akan merembet ke wilayah lain dan ada kecenderungan untuk saling intervensi. Sebagai contoh ketika gelombang demokratisasi merebak di Bahrain sebuah negara monarki dengan Sunni sebagai penguasanya di tengah-tengah mayoritas kaum Syiah, Arab Saudi melibatkan diri dalam pergolakan politik di negara ini dengan mengirimkan pasukannya untuk membantu penguasa Bahrain. Hal yang sama juga terjadi di Yaman ketika Syiah Houthi ingin merebut kekuasaan dari Presiden Hadi, Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya intervensi dengan kekuatan militernya.

Semangat *qaumiyya* tidak hanya di level negara, namun juga di level rakyat. Penderitaan yang alami oleh rakyat Palestina akibat penjajahan Israel telah menjadi “all Arabic core concern” (Rais 1988). Pergolakan politik yang terjadi di Tunisia dengan cepat merembet ke negara-negara sekitarnya karena mereka tidak memiliki hambatan untuk mengakses berita dan informasi mengingat adanya kesamaan bahasa. Terlebih Tunisia, Aljazair, Maroko dahulu pada masa Kesultanan Islam merupakan satu kesatuan wilayah (dikenal dengan istilah wilayah Maghrib). Hal yang sama juga terjadi di Suriah ketika minoritas Syiah Alawi yang berkuasa menindas mayoritas Sunni, sentimen untuk melibatkan diri kalangan Sunni dalam pergolakan politik di Suriah demikian tinggi. Relawan-relawan jihad dari negara-negara Arab di sekitar Suriah berusaha membantu oposisi di Syria, sedangkan Syiah Alawi dibantu oleh Hezbollah dari Lebanon Selatan dan Iran.

Sikap saling intervensi ini bertentangan dengan semangat nasionalisme yang kedua yaitu *wathaniyya*. Paham kebangsaan ini didasarkan pada adanya satu kesatuan teritori tertentu yang bernama negara. Problem utama dalam mengembangkan model nasionalisme kedua ini adalah tidak adanya latar belakang historis yang dapat dibanggakan sebagai negara, karena terbentuknya negara-negara di Timur Tengah relatif baru yaitu pada awal abad ke-20 sampai dengan pertengahannya. Sementara ikatan sejarah yang terbentuk sebelum masing-masing kawasan menjadi negara merdeka adalah ikatan sejarah panjang peradaban Islam berabad-abad dengan sistem kesultanan/kekhalfahan. Saringan ideologi dan budaya di masing-masing negara sangat lemah, karena sebenarnya mereka secara ideologi dan budaya relatif sama. Oleh karena

itu, suatu pemikiran keagamaan dan pergerakan dengan gampang berkembang lintas batas negara di Timur Tengah.

Dimensi Internasional: Turki, Dunia Islam dan Barat

Dimensi internasional yang tidak dapat diabaikan dalam dinamika politik di negara-negara Arab adalah peran Turki (Unver 2013; Bengio 2012). Negara ini bukan negara Arab, namun pengaruhnya untuk mereformasi sistem politik di negara-negara Arab tidak dapat diabaikan. Keberhasilan Partai Keadilan dan Pembangunan Turki dibawah Erdogan dalam membangun Turki yang modern dan disegani menginspirasi gerakan-gerakan Islam di kawasan Timur Tengah ketika melakukan upaya mewujudkan tatanan yang demokratis. Terlebih, kebijakan luar negeri Turki dalam merespon *Arab Spring* adalah pro dengan gerakan-gerakan yang menginginkan perubahan rezim. Turki adalah negara yang memfasilitasi pertemuan-pertemuan kelompok oposisi Libya (NTC/National Transitional Council) sebelum Khadafi jatuh dan mengakui pemerintahan transisi ini sejak 15 Juli 2011 sebelum PBB memberikan pengakuan. Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan adalah pemimpin negara yang pertama kali mengunjungi Mesir setelah Mubarak jatuh. Majalah *Time* (13/9/2011) menggambarkan sambutan untuk Erdogan seperti “a rock star”. Ketika pergolakan politik terjadi di Syria, kembali PM Erdogan menunjukkan sikap tegasnya dengan membekukan hubungan diplomatiknya dengan rezim Bashar Assad. Erdogan mengatakan, “The Syrian people do not believe in Assad, nor do I. We also do not believe him” (*Time*, 13/9/2011). Ketika eskalasi konflik di Syria semakin memanas, Turki termasuk negara yang gigih memperjuangkan intervensi militer bersama-sama dengan NATO. Saat gelombang pengungsi keluar dari wilayah Syria, negara ini bersedia menjadi tempat penampungan bagi ratusan ribu warga Syria yang mengungsi.

Disaat Turki demikian ingin negara-negara Arab menjadi negara yang demokratis, negara-negara Barat terkesan ragu-ragu bahkan khawatir dengan dinamika politik yang terjadi di Timur Tengah. Ketika George W. Bush naik untuk kedua kalinya sebagai President AS, kebijakannya menyangkut dinamika politik di Timur Tengah selain tetap mendukung posisi Israel terhadap Palestina, juga promosi demokrasi di kawasan ini. Dia percaya bahwa terorisme di Timur Tengah akan dapat diatasi dengan mendemokratiskan kehidupan politik (White House 2003). Demokrasi diyakini dapat memoderasi sikap-sikap politik yang radikal dan pada saat yang sama juga menghalanginya tampilnya rezim tirani. Munculnya penguasa tiran akan memunculkan sikap oposisi dan ketika oposisi tidak memiliki saluran untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya sangat mungkin cara-cara kekerasan yang kemudian ditempuh (Snider dan Faris 2011).

Kekerasan akan menimbulkan citra negatif terhadap kawasan ini. Mengingat kawasan ini dihuni mayoritas Muslim, dalam perkembangannya dapat memunculkan *Islam phobia*. Pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) Kesebelas di Sinegal pada bulan Maret 2008 bertujuan untuk membangun image positif terhadap Islam, menghilangkan *Islam phobia*, dan mengintensifkan dialog antar peradaban (OIC, 2008). Pada kesempatan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa upaya untuk mengurangi kesalahpahaman terhadap Islam adalah dengan menjadikan negara-negara Islam sebagai negara demokratis (Deplu, 2008). Oleh karena itu, Indonesia mendorong reformasi dalam tubuh OKI dengan memasukkan nilai-nilai demokrasi ke dalam Piagam OKI yang baru.

Namun, upaya untuk membangun sistem yang demokratis di Timur Tengah bukan hal yang mudah terutama sejak Amerika Serikat menjadi sasaran serangan teroris pada 11 September 2001. Disaat AS dibawah Bush Jr mempromosikan demokrasi di Timur Tengah, pada saat yang sama ia juga menkampanyekan "*war on terror*" dan mengkategorikan negara-negara di dunia "*either with us or with terrorist*". Kecurigaan bahwa pelaku terorisme berasal dari kalangan Islam terlebih setelah itu AS melancarkan serangan ke negara Islam (Afghanistan dibawah Taliban) memberikan legitimasi bagi negara-negara di Timur Tengah untuk menekan kelompok-kelompok Islam yang selama ini berseberangan dengan pemerintah dengan alasan "perang melawan terorisme". Padahal belum tentu kelompok-kelompok tersebut menggunakan cara kekerasan untuk merealisasikan tujuannya. Dengan kata lain, isu terorisme ini telah menggeser isu demokratisasi yang selama ini dicoba diterapkan di Timur Tengah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Timur Tengah, namun juga di negara-negara Muslim di kawasan Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara (Foot 2005).

Kenyataan bahwa negara-negara Barat seolah membiarkan ketika rezim otoriter di negara Muslim menekan kekuatan-kekuatan Islam menimbulkan tanda tanya seberapa seriuskah Barat mendukung demokratisasi di negara-negara Muslim (Khan 2003). Keraguan ini muncul terutama ketika HAMAS sebagai salah satu gerakan yang menentang eksistensi Israel memenangkan pemilu yang digelar di wilayah pendudukan pada tahun 2006, rakyat Palestina justru mendapat hukuman dari Barat. Negara-negara Barat akan mengakui HAMAS sebagai pemenang pemilu jika gerakan ini mau meletakkan senjata, tidak menggunakan cara-cara kekerasan, mengakui eksistensi Israel, dan mau menerima semua kesepakatan yang dicapai dalam perundingan antara Israel dan Otoritas Palestina (PLO). HAMAS menolak syarat-syarat tersebut, akibatnya gerakan ini dan rakyat Palestina diisolasi dari pergaulan internasional. Bantuan-bantuan dari luar (Barat) yang selama ini diperoleh rakyat Palestina dihentikan, pajak yang dibayar oleh rakyat Palestina kepada Israel dan semestinya

dikembalikan lagi kepada rakyat Palestina juga dihentikan, dan asset-asset milik HAMAS dibekukan (Muttaqien 2012). Perlakuan terhadap HAMAS ini seolah mengulang perlakuan terhadap FIS di Aljazair di awal 1990an.

Ketidaktegasan Barat terhadap kudeta militer di Mesir kembali memunculkan sikap skeptik kekuatan-kekuatan Islam atas keseriusan Barat dalam mendorong demokratisasi di Timur Tengah. Kembalinya kekuatan militer Mesir dengan cara kudeta militer diiringi dengan penangkapan para aktivis Muslim, pemberangusan media massa yang tidak sejalan dengan kepentingan penguasa militer, pembekuan asset-asset milik Ikhwanul Muslimin dan terbunuhnya para demonstran yang menentang rezim militer di lapangan Rabi'a Al-'Adawiyya pada bulan Agustus 2013 tanpa sikap tegas dari Barat untuk menghentikan dan menekan rezim militer di Mesir menguatkan tuduhan standard ganda Barat dalam menerapkan, mempromosikan dan menegakkan sistem demokrasi. Dengan sikap semacam ini gelombang balik demokratisasi di Timur Tengah bisa terjadi, yaitu ketika cara-cara tidak demokratis seperti kudeta mendapatkan pembenaran manakala sistem demokrasi yang diterapkan memberikan keleluasaan kepada kekuatan Islam yang mendapat dukungan rakyat memegang tampuk kekuasaan, kemudian kekuasaan tersebut diambil alih dengan cara-cara yang tidak demokratis.

Simpulan

Apabila diamati perkembangan politik di Timur Tengah sejak munculnya fenomena *Arab Spring* yaitu gelombang demokratisasi yang melanda dunia Arab di musim semi 2011 ada satu alasan pokok mengapa ini bisa terjadi, yaitu ketidakpuasan secara massif rakyat kepada gaya kepemimpinan rezim penguasa di negara-negara Arab. Umumnya penguasa di negeri-negeri tersebut otoriter, korup dan hidup glamour di tengah situasi dan kondisi rakyat yang kekurangan. Kalau rakyatnya berkecukupan seperti di negara-negara Teluk, mereka menghadapi sumbatan-sumbatan yang menghalang-halangi mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik yang lebih luas. Peristiwa bakar diri seorang pedagang di Tunisia yang tidak berdaya menghadapi arogansi kekuasaan menyulut protes dan menjadi momentum yang menggerakkan rakyat di negara-negara sekitarnya dengan tuntutan perubahan rezim. Pergerakan massa ini didukung oleh proses penyebaran informasi yang cepat sebagai imbas dari globalisasi teknologi. Kekerasan dan penindasan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini dilakukan rezim yang berkuasa, tidak lagi bisa ditutup-tutupi.

Dinamika perubahan di Timur Tengah ini, selain dipicu oleh peristiwa di Tunisia, juga disebabkan oleh semakin kuatnya pengaruh aktor non-negara terutama gerakan-gerakan keagamaan yang menekankan pembentukan basis masyarakat sebagai pilar untuk meraih dukungan. Gerakan keagamaan dengan karakter kosmopolitan seperti Ikhwanul Muslimin yang memiliki jaringan lintas batas negara membuat resonansi dan irama pergerakan terkoordinasi dengan baik. Pandangan Ikhwanul Muslimin yang menerima demokrasi sebagai suatu sistem yang dapat mencegah lahirnya penguasa tirani, memungkinkan pergerakan ini berkembang khususnya di Timur Tengah di tengah stigma “teroris, ekstrimis, dan fundamentalis”, label yang diberikan bagi mereka yang konsisten dengan Islam.

Jaringan lintas batas negara gerakan keagamaan tidak hanya memunculkan persinggungan positif antar gerakan Islam, namun juga dengan penguasa atau aktor negara yang mendukung tumbuhnya kekuatan-kekuatan oposisi. Dalam hal ini Turki menunjukkan komitmennya untuk menyemaikan nilai-nilai demokrasi di Timur Tengah. Dukungan yang ditunjukkan oleh Turki terhadap kekuatan-kekuatan oposisi dibuktikan dengan mengakui eksistensi mereka dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan mereka. Tentu ini memiliki bobot yang tinggi dalam sistem internasional kontemporer yang masih menempatkan negara sebagai unit utama.

Dinamika pergerakan tidak hanya dalam ruang lingkup domestik, namun juga regional dan internasional. Masuknya nilai-nilai baru dan perkembangan teknologi informasi di negara-negara Arab, dalam lingkup domestik dan regional, mempengaruhi pola interaksi dan penyebaran informasi. Kalangan muda dan kelas menengah (Tobin 2012) yang tidak awam dengan teknologi informasi dan menjadi kekuatan utama dalam *Arab Spring* menggunakan media sosial dalam interaksi diantara mereka dan menjadikan media tersebut untuk melakukan pergerakan massa. Situasi dan kondisi yang ada di lapangan menyangkut demonstrasi, protes, kekerasan aparat keamanan, maupun seruan-seruan aksi disebarluaskan melalui media sosial. Penyebaran informasi dan pergerakan tidak hanya dalam ruang lingkup domestik akan tetapi juga regional bahkan internasional.

Hal terakhir yang dapat disimpulkan dari fenomena *Arab Spring* adalah bahwa merebaknya *Arab Spring* menyisakan permasalahan yang timbul karena kecurigaan. Kalangan Islam curiga bahwa negara-negara Barat tidak serius dalam mendukung penegakkan sistem demokrasi di Timur Tengah dengan adanya kenyataan bahwa sistem ini memberikan jalan bagi kalangan Islam untuk tampil berkuasa. Demikian juga pihak Barat merasa khawatir ketika gerakan Islam tampil berkuasa maka kepentingan-kepentingan mereka di negeri-negeri Muslim akan terancam. Akibatnya, ketika ada cara-cara yang tidak demokratis

dilakukan oleh rezim yang pro Barat di negara-negara Timur Tengah untuk mencegahnya tampilnya kelompok Islam, terlihat Barat “merestui” langkah-langkah tersebut. Pada titik inilah proses demokratisasi di Timur Tengah berada di persimpangan jalan.

Daftar Pustaka

Buku

- Andersen, Roy R., et al, 1998. *Politics and Change in the Middle East*. New Jersey: Prentice Hall.
- Dollar, David. 2007. "Globalization, Poverty and Inequality since 1980". dalam Held, David dan Ayse Kaya (eds.), 2007. *Global Inequality*, Cambridge: Polity.
- Drysdale, A. dan G.H. Blake, 1985. *The Middle East and North Africa: A Political Geography*. New York: Oxford University Press.
- Esposito, John L., 1995. *Islamic Threat: Myth or Reality?* New York: Oxford University Press.
- Huntington, Samuel P., 1991. *Third Wave of Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman Oklahoma: University of Oklahoma.
- Linklater, Andrew, 2005. "Globalization and Transformation of Political Community", dalam Baylis, John, dan Steve Smith (eds.), 2005. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- McGrew, Anthony, 2005. "Globalization and Global Politics", dalam Baylis, John, dan Steve Smith (eds.), 2005. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- Muttaqien, M., 2012. *The Rise of the Islamic Resistance Movement (HAMAS): Causes and Consequences*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.
- Rais, M.A., 1988. *Politik dan Pemerintahan di Timur Tengah*. Yogyakarta: PAU-SS-UGM.

Artikel Jurnal

- Bahry, Louay Y., 2001. "The New Arab Media Phenomenon: Qatar's Al-Jazeera". *Middle East Policy*, June, **8** (2): 88-99.
- Bengio, Ofra, 2012. "Are Iraq and Turkey Models for Democratization". *Middle East Quarterly*, Summer: 53-62.
- Doron, Daniel, 2012. "Free Market Can Transform the Middle East". *Middle East Quarterly*, Spring: 15-22.

- Foot, R., 2005. "Collateral Damage: Human Rights Consequences of Counterterrorist Action in the Asia Pacific", *International Affairs*, **81** (2): 411-425.
- Khan, M., 2003. "Prospect for Muslim Democracy: the Role of the U.S. Policy", *Middle East Policy*, Fall, **10** (3): 79-90.
- Khashan, Hilal, 2011. "Middle Eastern Upheavals: the View from Syria and Lebanon", *Middle East Quarterly*, Summer: 25-30.
- Landis, Joshua, 2012. "The Syrian Uprising of 2012: Why the Assad Regime is Likely to Survive to 2013", *Middle East Policy*, Spring, **19** (1): 72-84.
- Lesch, Ann M., 2011. "Egypt's Spring: Causes of Revolution", *Middle East Policy*, Fall, **18** (3): 35-48.
- Snider, Erin A., dan David M. Faris, 2011. "The Arab Spring: U.S. Democracy Promotion in Egypt", *Middle East Policy*, Fall, **18** (3): 49-62.
- Tobin, Sarah A., 2012. "Jordan's Arab Spring: the Middle Class and Anti-Revolution", *Middle East Policy*, Spring, **19** (1): 96-109.
- Unver, H. Akin, 2013. "Turkey, Past and Future: the Forgotten Secular Turkish Model", *Middle East Quarterly*, Winter: 57-64.
- Voll et al, John, 2012. "Political Islam in the Arab Awakening: Who Are the Major Players", *Middle East Policy*, Summer, **19** (2): 10-35.

Publikasi Resmi

- Departemen Luar Negeri (Deplu), 2008. "Statement by President of the Republic of Indonesia at the 11th Summit of the Organization of the Islamic Conference, Dakar, Senegal. 15 March 2008" [online]. dalam www.deplu.go.id, [diakses 2 November 2010].
- Organization of Islamic Conference (OIC), 2008. "The 11th Session of Islamic Summit Conference: Dakkar Declaration" [online]. dalam <http://www.oic-oci.org/is11/english/DAKKAR-DEC-11SUMMIT-E.pdf> [diakses 10 November 2013].
- White House, 2003. "President Bush Presses for Peace in the Middle East" [online]. dalam <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/05/20030509-11.html> [diakses 10 November 2013].

Majalah

The Economist, 2011. "Tunisia's General Election: Islamist to the fore", 29 October.

The Washington Post, 2011. "Moroccan Islamist Party Latest to Win Election Inspired by the *Arab Spring*", 28 November.

Time, 2011. "Why Turkey's Erdogan is Greated Like a Rock Star in Egypt", 13 September.